



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Adisucipto Nomor 1 – Ruteng – Kab. Manggarai

LKIP PUPR TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MANGGARAI



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

puprmanggarai01@gmail.com





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memberi gambaran keseluruhan hasil kegiatan dan kerja keras dinas PUPR selama Tahun 2025 dan selama periode 2021-2026 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai. Laporan ini berisikan laporan atas penggunaan anggaran yang meliputi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, Dinas senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N0. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai tidak terlepas dari peran Dinas PUPR di Kabupaten Manggarai yang tentu saja mendapat dukungan dan bantuan pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur maupun yang memberi dukungan dalam perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dinas PUPR sebagai dinas yang mengemban tugas membantu bupati membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi



Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dalam periode 2021-2026 telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Pada Tahun 2025 alokasi anggaran belanja Dinas PUPR pada TA. 2025 adalah Rp. **112.569.730.026,-** dengan realisasi Rp. **104.726.058.460,-** (93,03%). Capaian kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 dari 6 sasaran strategis adalah 87,87% dengan kategori Baik.

Keseluruhan capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas PUPR yang bekerja sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi mewujudkan “Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”. Namun kami juga menyadari bahwa dalam seluruh proses penyelenggaraan infrastruktur masih banyak kekurangan yang terjadi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Karena itu segala saran dan kritikan kami terima sebagai pemacu kerja keras di masa depan.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai khususnya dan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada umumnya.

Ruteng, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai,

Wilfridus E. Elfrid Turuk, S.T

Pembina, IV/a

NIP.19751014 200604 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. LATAR BELAKANG	11
1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI	14
1.2.1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi	14
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	14
1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	16
1.4. INTERPRETASI PREDIKAT CAPAIAN KINERJA	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026.....	18
2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	19
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	24
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	32
3.2 EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.2.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2.2 Perbandingan Indikator Kinerja	52
3.2.3 Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	53
3.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
3.2.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	57
3.3 REALISASI ANGGARAN	58
3.3.1 Target dan Realisasi Anggaran	58
3.3.2 Pendapatan.....	59
3.3.3 Belanja	59
3.3.4 Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis ..	60
3.3.5 Efisiensi Penggunaan Anggaran	61
3.3.6 Efektifitas Capaian Kinerja	63
3.4 INOVASI	65
3.4.1 Pengenalan Inovasi	65
3.4.2 Realisasi Pengukuran Target Inovasi.....	69
BAB IV PENUTUP	70



LAMPIRAN	72
-----------------------	-----------



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai akan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten Manggarai selama periode 2021-2026. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2025 Dinas PUPR Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **112.569.730.026,-**

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 Dinas PUPR melaksanakan 9 program, 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Tahun 2025 ini merupakan tahun awal pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 9 (Sembilan) program strategis yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 6) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan permendagri terkait urusan limbah yang sebelumnya di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai. Sedangkan pengelolaan persampahan tetap menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten



Manggarai dan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai hanya menangani penyediaan infrastruktur persampahan.

Pada Tahun 2025 ini Dinas PUPR memiliki 6 (Enam) sasaran strategis yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 melaksanakan 8 (Delapan) program strategis dan 1 (satu) program penunjang, yaitu :

- 1) *Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*
 - a. Meningkatnya persentase Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana;
 - b. Meningkatnya persentase luas lahan yang terlayani irigasi primer;
- 2) *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*
Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan;
- 3) *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limba*
Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan;
- 4) *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase*
Peningkatan persentase drainase perkotaan yang dibangun;
- 5) *Program Penyelenggaraan Jalan*
Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi mantap;
- 6) *Program Penataan Bangunan Gedung*
Meningkatnya persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali;
- 7) *Program Pengembangan Jasa Konstruksi*
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;
- 8) *Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*
Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali;
- 9) *Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Dalam menjalankan tugasnya Dinas PUPR mendapat dukungan dari 5 bidang yang menjalankan 8 sasaran strategis dan sekretariat yang menjalankan 1 program pendukung. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat



dukungan dari 99 orang PNS dan 28 orang PPPK dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.909.906.347,- sesuai APBD Perubahan TA. 2025, yang terdiri dari :

- DAK : Rp. 14.764.866.000,-
- DAU BG : Rp. 97.804.864.026,-

dengan alokasi belanja modal sebesar Rp. 93.206.361.565,- dan belanja operasional Rp. 19.363.368.461,-

Capaian kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 dari 6 sasaran strategis adalah 87,87%. Capaian terhadap penganggaran yaitu untuk belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp. 104.726.058.460,- dengan persentase 93,03%

Secara rinci capaian kinerja Dinas PUPR selama periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)= (f)/(e)x100%
	PROGRAM DASAR					
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan ti yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17	33,62	69,79
	Rata-rata Sasaran 1					69,79
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95	55,88	86,04
	Rata-rata Sasaran 2					86,04
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen	84,80	72,92	85,99
	Rata-rata Sasaran 3					85,99
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84	88,97	92,83
	Rata-rata Sasaran 4					92,83
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,93	86,66	99,69
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00	87,92	95,57



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)= (f)/(e)x100%
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	38,30	34,31	89,57
	Rata-rata Sasaran 5					284,83
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00	43,28	83,23
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,029	0,016	55,52
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	83,00	100,00	120,48
	Rata-rata Sasaran 6					259,23
	Rata-rata Sasaran Program Dasar					87,87
	Kategori					SANGAT BAIK
	PROGRAM PENDUKUNG	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen	99	99	100
	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	Persen	100	100	100
	Terlaksananya penyusunan pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Persentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	Persen	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen	100	100	100
	Rata-rata Sasaran 1					100
	Kategori					MEMUASKAN
	Rata-rata Sasaran Program Dasar dan Pendukung					93,94
	Kategori					SANGAT BAIK



Tabel 2
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Manggarai Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.566.391.462	7.136.026.503	94,31	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.560.285.000	3.529.864.512	99,15	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.490.452.000	8.883.691.061	93,61	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.536.014.000	9.459.275.949	99,20	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.790.633.826	2.766.130.561	99,12	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.218.652.049	1.206.661.799	99,02	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.846.916.939	71.318.582.260	91,61	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	259.084.750	187.190.648	72,25	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	301.300.000	238.635.167	79,20	
TOTAL		112.569.730.026	104.726.058.460	93,03	BAIK



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan laporan instansi yang disusun dengan menguraikan seluruh proses dalam suatu instansi sejak awal tahun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan harus dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah yang meliputi penggunaan sarana prasarana, sumber daya dan anggaran.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja dimaksud berisi uraian singkat organisasi terkait tugas dan fungsi; Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 ini, penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga pemerintah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang termasuk oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas SKPD. Penyelenggaraan SAKIP dimaksud meliputi:

- 1) rencana strategis;
- 2) perjanjian Kinerja;
- 3) pengukuran Kinerja;
- 4) pengelolaan data Kinerja;
- 5) pelaporan Kinerja; dan
- 6) reviu dan evaluasi Kinerja



Laporan Kinerja yang disusun Dinas PUPR ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai selama Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Seluruh capaian kinerja Tahun 2025 akan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi selama satu periode (2021-2026). Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Pada Tahun 2025 Dinas PUPR belum melaksanakan program terkait persampahan dan limbah disebabkan karena tidak adanya ketersediaan anggaran dan masih ada keraguan untuk menjalankan program dikarenakan belum ada kepastian kewenangan pengurusan persampahan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BLHD), Namun akhirnya Program kegiatan tersebut sudah disesuaikan kedalam Renstra Dinas PUPR. Hal ini terjadi untuk melaksanakan amanat Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana program terkait persampahan dan limbah, menjadi urusan bidang pekerjaan umum.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 melaksanakan 8 (delapan) program strategis dan 1 (satu) program pendukung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.569.730.026 sesuai APBD Perubahan TA. 2025, yang terdiri dari :

- DAK : Rp. 14.764.866.000,-
- DAU BG : Rp. 97.804.864.026,-

dengan alokasi belanja modal sebesar Rp. 93.206.361.565,- dan belanja operasional Rp. 19.363.368.461,-. Anggaran tersebut dialokasi untuk melaksanakan program kegiatan bidang penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan SPAM, pengembangan permukiman, persampahan dan limbah, penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi,



kegiatan pembinaan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas PUPR adalah:

1) Air minum dan sanitasi

Belum terpenuhinya layanan air minum bersih secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai menjadi isu penting dalam periode RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026. Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhannya, telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk. Kebutuhan air minum bersih tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas layanan air minum; ditambah lagi berkurangnya debit pada sumber mata air baik akibat perubahan iklim maupun karena perilaku manusia serta masalah pembebasan lahan di sumber mata air. Di sektor lain muncul permasalahan seperti kurangnya infrastruktur untuk meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air, baik untuk sanitasi maupun untuk irigasi.

2) Penyelenggaraan jalan/jembatan

Masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi mantap, kurangnya sarana pendukung kelengkapan jalan (drainase, trotoar,dll), serta masalah kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai.

3) Penataan Ruang

Isu strategis terkait penataan ruang disebabkan karena belum ditetapkannya regulasi baik RTRW, RDTR maupun regulasi lain terkait tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang salah satunya berakibat pada pemanfaatan ruang menjadi tidak sesuai peruntukan



fungsi ruang; terjadinya alih fungsi lahan/ruang seperti dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, serta menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung (mata air, sempadan sungai dll). Persoalan lain adalah belum maksimalnya penyelenggaraan IMB dan SLF.

4) Jasa konstruksi

Belum tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi menjadi permasalahan jasa konstruksi di Kabupaten Manggarai. Disamping itu belum terlaksananya Bimtek bagi tenaga kerja konstruksi.

5) Sumber Daya Manusia

Dalam periode 2021-2026 jumlah SDM aparatur Dinas PUPR yang memiliki kualifikasi khusus konstruksi masih sangat kurang. Akibatnya kegiatan-kegiatan proyek yang dilakukan tidak dapat ditangani secara penuh.

Uraian tentang jawaban atas isu strategis tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja ini dan diharapkan akan memberikan umpan balik untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. Upaya dimaksud hendaknya merupakan usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan baik proses maupun cara kerja demi peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI

1.2.1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan;

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat;
- 2) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air;
- 3) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Bina Marga;
- 4) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Cipta Karya;
- 5) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penataan Ruang;
- 6) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Teknologi Jasa Konstruksi;
- 7) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional;
- 8) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Secara rinci Strukur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai berikut:



1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2025 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum perlunya penyusunan laporan kinerja, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025 dan analisi capaian 2021-2026 serta target dan realisasi anggaran Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran:

- 1) Matriks Renstra
- 2) Rencana kinerja
- 3) Perjanjian Kinerja
- 4) Pengukuran Kinerja
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu

1.4. INTERPRETASI PREDIKAT CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Predikat Capaian Kinerja Merujuk pada interpretasi yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Interpretasi Predikat Capaian Kinerja

No	NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
1	$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
2	$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
3	$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
4	$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Visi Kabupaten Manggarai Tahun **2021-2026** adalah ***“Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing”***. Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Manggarai tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 dan tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025, berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam laporan ini juga akan disampaikan perbandingan keseluruhan target dan capaian dalam periode RPJMD 2021-2026 untuk dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan pada periode berikutnya.

Dalam rangka mendukung Misi 1(satu) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, Misi 2 (Dua) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Misi 3 (tiga) Meningkatkan Mutu lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, maka Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan



tersebut, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, air minum, normalisasi saluran sungai, jaringan irigasi, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, jalan lingkungan, pembinaan jasa konstruksi dan penataan ruang.

2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah adalah :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sa t.	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	%	16,60	23,74	32,55	41,36	48,17	58,60
2	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	53,21	56,15	59,08	62,02	64,95	67,88
		Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang terbangun	%	72	76,2	79,7	81,7	84,8	88
		Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	%	77	81,71	86,42	91,13	95,84	100
3	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	%	74,03	78,092	81,037	83,982	86,927	89,872
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses	%	86	88	89	91	92	93



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
			terhadap air minum layak dan berkelanjutan							
			Presentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	26,58	28,33	31,67	35,83	38,3	41,67
			Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	%	12	22	32	42	52	62
			Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,0058	0,012	0,018	0,023	0,029	0,036
			Presentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25	38	53	68	83	95
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase cakupan area pelayanan sampah	%	28,3	28,3	28,3	31,6	31,6	31,6

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel.2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT.	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN		SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketersediaan bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	$\frac{\text{Luas kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana}}{\text{Luas kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui kawasan rawan bencana yang telah memiliki bangunan pengendali bencana - Merupakan Luas kawasan rawan bencana yang telah memiliki bangunan pengendali bencana dibagi luas kawasan rawan bencana dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap}}{\text{Panjang jalan Kabupaten seluruhnya}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui panjang jalan dalam kondisi baik/ mantap. - Merupakan Panjang jalan kondisi mantap sesuai kewenangan pemerintah kabupaten dibagi panjang seluruh jalan kewenangan pemerintah kabupaten dikali 100 %	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan terbangun	Persen	$\frac{\text{Jumlah jembatan yang dibangun}}{\text{Target pembangunan jembatan}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui jumlah jembatan yang telah dibangun. - Merupakan realisasi Jumlah jembatan yang dibangun sesuai kewenangan pemerintah kabupaten dibagi target pembangunan jembatan kewenangan pemerintah kabupaten dikali 100 %	Bidang Bina Marga
3	Meningkatnya kualitas jaringan drainase	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	$\frac{\text{Panjang saluran drainase yang terbangun}}{\text{Target pembangunan drainase}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui drainase perkotaan yang terbangun - Merupakan Panjang saluran drainase yang terbangun selama satu tahun dibagi target pembangunan drainase selama satu tahun dikali 100 %	Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pertanian yang belum optimal	Persentase Luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi primer}}{\text{Luas seluruh Daerah Irigasi}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang sudah terlayani jaringan irigasi primer - Merupakan luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi primer dibagi luas daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten seluruhnya dikali 100 %	Bidang Sumber Daya Air



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT.	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN		SUMBER DATA
5	Meningkatnya akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Level	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga di daerah kabupaten}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak - Merupakan Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi Jumlah seluruh rumah tangga di daerah kabupaten dikali 100 %	Bidang Cipta Karya
5.1		Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah kecamatan di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan - Merupakan Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan di bagi jumlah seluruh kecamatan di daerah kabupaten dikali 100 %	Bidang Cipta Karya
5.2		Persentase infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis dalam kondisi baik	Persen	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman di kawasan strategis yang tertata}}{\text{Luas kawasan strategis}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui luas kawasan permukiman yang tertata di kawasan strategis dalam tahun existing - Merupakan luas kawasan permukiman yang tertata di kawasan strategis dibagi luas kawasan strategis dikali 100 %	Bidang Cipta Karya
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan air minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga di daerah kabupaten}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak - Merupakan Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan dibagi Jumlah proyeksi seluruh rumah tangga di daerah kabupaten dikali 100 %	Bidang Cipta Karya
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR}}{\text{Jumlah kecamatan di daerah kabupaten}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui drainase perkotaan yang terbangun - Merupakan Jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR dibagi Jumlah kecamatan di daerah kabupaten dikali 100%	Bidang Tata Ruang
8		Rasio Kepatuhan IMB	Persen	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah poyeksi bangunan}} \times 100\%$	- Untuk mengetahui jumlah bangunan yang memiliki IMB - Merupakan jumlah bangunan yang memiliki IMB dibagi Jumlah proyeksi bangunan di daerah kabupaten	Bidang Cipta Karya



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT.	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN		SUMBER DATA
9		Persentase tenaga operator /teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih diwilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator/teknisi/ analis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator /teknisi/ analis di wilayah kabupaten	• Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih diwilayah kabupaten yang memiliki sertifikat kompetensi • Merupakan Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih diwilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator/teknisi/ analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator /teknisi/ analis di wilayah kabupaten	Bidang Jasa Konstruksi



2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu dengan bertambahnya urusan persampahan dan limbah pada Dinas PUPR, maka Dinas PUPR Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi, dan abrasi pantai	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	48,17	Persen
		1.1 Jumlah bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dapat dioperasikan dan di pelihara	1,00	unit
		1.2 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,50	km
2	Meningkatnya Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	95,84	Persen
		2.1 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6,95	km
		2.2 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,83	km
3	Meningkatnya Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	64,95	Persen
		3.1 Panjang Jalan yang Dibangun	23,54	Km
		3.2 Jumlah Jembatan yang Dibangun	1,00	Unit
		3.3 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	10,00	Km
		3.4 Panjang Jalan yang Direhabilitasi	65,14	Km
4	peningkatan Persentase Drainase perkotaan yang dibangun	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	84,80	Persen



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		2.1 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8,00	SDP
		2.2 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9,00	SDP
		2.3 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4,00	SDP
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	86,93	Persen
		4.1.1 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	525,00	RT
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	92,00	Persen
		4.2.1 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2,00	Liter/Detik
		4.2.2 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	40,00	Unit
		4.2.3 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	704,00	Unit
		Persentase jalan lingkungan yang terbangun	2,76	%
		4.3.1 panjang jalan lingkungan terbangun	759,70	M
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	52,00	Persen
		6.1.1 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	10,00	Dokumen
		6.1.3 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5,00	Dokumen
		6.1.4 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10,00	Dokumen
		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	83,00	%
		6.2.1 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50,00	Orang
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,029	Rasio
		6.3.1 Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	10,00	Bantuan Teknis
		6.3.2 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		6.3.3 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	80,00	Dokumen

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau *reward* dan sanksi atau *punishment*.

Tahun 2025 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memiliki 6 (Enam) target sasaran strategis Dinas yang harus dicapai melalui pelaksanaan 8 (delapan) program prioritas dan 1 (satu) Program Pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.569.730.026,- sesuai APBD Perubahan TA. 2025.

Selain itu, Dinas PUPR juga melaksanakan 1 (satu) program penunjang mendukung pelaksanaan program-program prioritas. Sasaran strategis yang hendak dicapai dibuat dalam perjanjian kinerja ke setiap jenjang pemegang peran pada masing-masing bidang Dinas PUPR sesuai tugas pokoknya



masing-masing. Berikut ini Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	1.1 Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	%	48,17
2	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	2.1 Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	64,95
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	3.1 Persentase Drainase Perkotaan yang terbangun	%	84,80
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	4.1 Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	%	95,84
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	5.1 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	%	86,93
		5.2 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	%	92,00
		5.3 Persentase jalan lingkungan yang terbangun	%	38,30
6	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	6.1 Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	%	52,00
		6.2 Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Rasio	0,029
		6.3 Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	83,00



PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			DPA 2025 (Rp.)	DPAP 2025 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA		MENJADI			
1.03	TOTAL	DINAS PUPR	DINAS PUPR	158.560.809.300	112.569.730.026	-45.991.079.274
1.03.01	PROGRAM :	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.355.286.300	7.566.391.462	-1.788.894.838
1.03.01.2.01	KEGIATAN :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.825.000	281.800.000	4.975.000
1.03.01.2.01.0001	SUB :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.035.000	48.210.000,00	5.175.000
1.03.01.2.01.0004	SUB :	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.755.000	17.455.000,00	-8.300.000
1.03.01.2.01.0005	SUB :	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.755.000	16.155.000,00	-3.600.000
1.03.01.2.01.0007	SUB :	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.280.000	199.980.000,00	11.700.000
1.03.01.2.02	KEGIATAN :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.651.275.599	6.400.835.818	-250.439.781
1.03.01.2.02.0001	SUB :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.909.765.175	5.914.526.215,60	4.761.041
1.03.01.2.02.0002	SUB :	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	741.510.424	486.309.602,00	-255.200.822
1.03.01.2.06	KEGIATAN :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.122.701	304.629.644	-128.493.057
1.03.01.2.06.0002	SUB :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.460.000	83.460.000,00	-124.000.000
1.03.01.2.06.0003	SUB :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.010.000	11.010.000,00	-
1.03.01.2.06.0005	SUB :	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.742.701	49.249.644,00	-4.493.057
1.03.01.2.06.0009	SUB :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.910.000	160.910.000,00	-
1.03.01.2.07	KEGIATAN :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	944.487.000	-	-944.487.000
1.03.01.2.07.0002	SUB :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	475.760.000	-	-475.760.000
1.03.01.2.07.0006	SUB :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	468.727.000	-	-468.727.000
1.03.01.2.08	KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.996.000	51.996.000	-
1.03.01.2.08.0002	SUB :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.996.000	51.996.000,00	-
1.03.01.2.09	KEGIATAN :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.580.000	527.130.000	-470.450.000
1.03.01.2.09.0002	SUB :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.130.000	277.130.000,00	-63.000.000
1.03.01.2.09.0003	SUB :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	425.550.000	250.000.000,00	-175.550.000
1.03.01.2.09.0009	SUB :	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.900.000	-	-231.900.000
1.03.02	PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.084.668.000	3.560.285.000	-6.524.383.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			DPA 2025 (Rp.)	DPAP 2025 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI			
1.03.02.2.01	KEGIATAN :	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.385.106.000	477.005.000	-908.101.000
1.03.02.2.01.0088	SUB :	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	226.830.000	-	-226.830.000
1.03.02.2.01.0093	SUB :	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	563.756.000	477.005.000	-86.751.000
1.03.02.2.01.0117	SUB :	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	594.520.000	-	-594.520.000
1.03.02.2.02	KEGIATAN :	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.699.562.000	3.083.280.000	-5.616.282.000
1.03.02.2.02.0008	SUB :	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.949.220.000	1.206.614.000	-1.742.606.000
1.03.02.2.02.0014	SUB :	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.598.842.000	1.724.666.000	-3.874.176.000
1.03.02.2.02.0021	SUB :	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	151.500.000	152.000.000	500.000
1.03.03	PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.753.612.000	9.490.452.000	-263.160.000
1.03.03.2.01	KEGIATAN :	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.753.612.000	9.490.452.000	-263.160.000
1.03.03.2.01.0026	SUB :	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.564.160.000	3.587.900.000	23.740.000
1.03.03.2.01.0028	SUB :	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.351.610.000	2.199.260.000	-152.350.000
1.03.03.2.01.0029	SUB :	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	422.850.000	405.000.000	-17.850.000
1.03.03.2.01.0032	SUB :	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.414.992.000	3.298.292.000	-116.700.000
1.03.05	PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.949.354.000	9.536.014.000	-413.340.000
1.03.05.2.01	KEGIATAN :	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.949.354.000	9.536.014.000	-413.340.000
1.03.05.2.01.0039	SUB :	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	9.199.354.000	8.783.214.000	-416.140.000
1.03.05.2.01.0041	SUB :	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	750.000.000	752.800.000	2.800.000
1.03.06	PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.022.150.000	2.790.633.826	-231.516.174
1.03.06.2.01	KEGIATAN :	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	3.022.150.000	2.790.633.826	-231.516.174



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			DPA 2025 (Rp.)	DPAP 2025 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI			
		Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.06.2.01.0028	SUB :	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	988.100.000	940.743.826	-47.356.174
1.03.06.2.01.0029	SUB :	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.486.200.000	1.344.890.000	-141.310.000
1.03.06.2.01.0031	SUB :	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	547.850.000	505.000.000	-42.850.000
1.03.08	PROGRAM :	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	344.250.000	1.218.652.049	874.402.049
1.03.08.2.01	KEGIATAN :	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	344.250.000	1.218.652.049	874.402.049
1.03.08.2.01.0020	SUB :	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	190.800.000	52.308.250	-138.491.750
1.03.08.2.01.0021	SUB :	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	1.119.243.799	1.119.243.799
1.03.08.2.01.0023	SUB :	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	153.450.000	47.100.000	-106.350.000
1.03.10	PROGRAM :	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	113.832.984.000	77.846.916.939	-35.986.067.061
1.03.10.2.01	KEGIATAN :	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	113.832.984.000	77.846.916.939	-35.986.067.061
1.03.10.2.01.0032	SUB :	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	62.737.589.000	23.265.544.960	-39.472.044.040
1.03.10.2.01.0038	SUB :	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	979.300.000	813.500.000	-165.800.000
1.03.10.2.01.0040	SUB :	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	1.722.330.000	1.418.582.700	-303.747.300
1.03.10.2.01.0043	SUB :	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.300.360.000	452.455.000	-847.905.000
1.03.10.2.01.0044	SUB :	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	44.738.605.000	49.833.334.279	5.094.729.279
1.03.10.2.01.0046	SUB :	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.354.800.000	2.063.500.000	-291.300.000
1.03.11	PROGRAM :	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	750.000.000	259.084.750	-490.915.250
1.03.11.2.01	KEGIATAN :	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	370.180.000	152.854.750	-217.325.250
1.03.11.2.01.0010	SUB :	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	370.180.000	152.854.750	-217.325.250
1.03.11.2.02	KEGIATAN :	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	127.790.000	13.120.000	-114.670.000
1.03.11.2.02.0013	SUB :	Penyediaan Data dan Informasi Jasa	Penyediaan Data dan Informasi Jasa	64.560.000	13.120.000	-51.440.000



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			DPA 2025 (Rp.)	DPAP 2025 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI			
		Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			
1.03.11.2.02.0014	SUB :	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	63.230.000	-	-63.230.000
1.03.11.2.04	KEGIATAN :	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	252.030.000	93.110.000	-158.920.000
1.03.11.2.04.0007	SUB :	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	252.030.000	93.110.000	-158.920.000
1.03.12	PROGRAM :	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.468.505.000	301.300.000	-1.167.205.000
1.03.12.2.01	KEGIATAN :	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	350.325.000	46.375.000	-303.950.000
1.03.12.2.01.0006	SUB :	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	350.325.000	46.375.000	-303.950.000
1.03.12.2.03	KEGIATAN :	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	797.750.000	189.965.000	-607.785.000
1.03.12.2.03.0004	SUB :	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	420.660.000	127.035.000	-293.625.000
1.03.12.2.03.0007	SUB :	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	377.090.000	62.930.000	-314.160.000
1.03.12.2.04	KEGIATAN :	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	320.430.000	64.960.000	-255.470.000
1.03.12.2.04.0004	SUB :	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	320.430.000	64.960.000	-255.470.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas PUPR diukur dengan cara mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai RKT Dinas PUPR Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis dinas PUPR adalah meningkatkan keandalan infrastruktur dalam rangka mewujudkan layanan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan air, sanitasi, penataan ruang yang semuanya diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini akan terwujud dengan adanya hasil/outcome dari program kegiatan yang dilaksanakan dinas PUPR yang tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan/memanfaatkan data kinerja, untuk itu perlu dibangun system informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan system informasi yang ada. Pengumpulan data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dilakukan dengan menyebarkan format Pengukuran Kinerja kepada setiap Sub Bagian dan Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta melakukan konfirmasi secara langsung kepada Sub Bagian dan Seksi tersebut. Selain itu dalam rangka memperoleh data yang akurat dinas PUPR juga berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan data dan informasi.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai



telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 6 (Enam) sasaran strategis. Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Manggarai melaksanakan program dan kegiatan.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)= (f)/(e)x100%
	PROGRAM DASAR					
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17	33,62	69,79
	Rata-rata Sasaran 1					69,79
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95	55,88	86,04
	Rata-rata Sasaran 2					86,04
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen	84,80	72,92	85,99
	Rata-rata Sasaran 3					85,99
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84	88,97	92,83
	Rata-rata Sasaran 4					96,50
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,93	86,66	99,69
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00	87,92	95,57
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	38,30	34,31	89,57
	Rata-rata Sasaran 5					284,83
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	42,00	40,77	83,23
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,023	0,014	55,52
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	68,00	99,65	120,48
	Rata-rata Sasaran 6					87,87
	Rata-rata Sasaran Program Dasar					87,87
	Kategori					SANGAT BAIK
	PROGRAM PENDUKUNG	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan	Persen	99	99	100



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)= (f)/(e)x100%
		yang Terpenuhi sesuai Standar				
	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	Persen	100	100	100
	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Persentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	Persen	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen	100	100	100
Rata-rata Sasaran 1						100
Kategori						MEMUASKAN
Rata-rata Sasaran Program Dasar dan Pendukung						93,94
Kategori						SANGAT BAIK

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.566.391.462	7.136.026.503	94,31	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.560.285.000	3.529.864.512	99,15	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.490.452.000	8.883.691.061	93,61	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.536.014.000	9.459.275.949	99,20	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.790.633.826	2.766.130.561	99,12	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.218.652.049	1.206.661.799	99,02	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.846.916.939	71.318.582.260	91,61	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	259.084.750	187.190.648	72,25	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	301.300.000	238.635.167	79,20	
TOTAL		112.569.730.026	104.726.058.460	93,03	BAIK





3.2 EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

3.2.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai merupakan capaian kumulatif untuk 1 (satu) periode RPJMD (2021-2026). Capaian Kinerja sesuai Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya persentase Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi dan abrasi pantai; Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Prosentase	=	$\frac{\text{Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana (Ha)}}{\text{Luas Kawasan rawan bencana (Ha)}} \times 100\%$	+	Kondisi Awal RPJMD
	=	$\frac{3,94}{23,12} \times 100\%$	+	16,6%
	=	33,62%		

Kondisi awal capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sebesar 16,6%. Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sebesar 3,94 Ha dari total luas Kawasan bencana di Kabupaten Manggarai 23,12 Ha atau mencapai 16,6%. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2025, persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sudah mencapai 33,62% dari target 48,17%, dengan tingkat capaian indikator sebesar 69,79%.

2). **Sasaran 2** : Meningkatnya Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prosentase	=	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi mantap (km)}}{\text{Panjang jalan kabupaten seluruhnya (km)}} \times 100\%$
	=	$\frac{790,23}{1414,12} \times 100\%$
	=	55,88%



Prosentase ini merupakan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2025. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah akumulasi dari Panjang jalan kabupaten pada kondisi permukaan **baik (542,23 km) dan sedang (248,00 km)** dibagi **total panjang jalan kabupaten seluruhnya (1414,12 km)**. Data ini merupakan data kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2025.

Tabel 3.2
Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan (km)

No	Uraian	Status Jalan																											
		Jalan Negara				Jalan Provinsi				Jalan Kabupaten																			
										AKHIR TA 2021			AKHIR TA 2022			AKHIR TA 2023			AKHIR TA 2024			AKHIR TA 2025							
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL		
1	2	5	4	5	5	8			15	16	17	15	16	17	15	16	17	15	16	17	15	16	17	15	16	17			
I	JENIS PERMUKAAN																												
	a. Holmix	120,94	120,94	120,94	120,94	20,16	20,16	20,16	46,68	297,43	0,00	297,43	293,75	0,00	293,75	431,38	0,00	431,38	388,12	0,00	388,12	388,12	0,00	388,12	388,12	0,00	388,12		
	b. Aspal					24,95	24,95	24,95	24,95	918,75	106,06	1024,81	1176,61	89,73	1266,35	791,96	165,85	957,81	825,34	165,85	991,19	825,34	165,85	991,19	825,34	165,85	991,19		
	c. Kerikil									128,36	168,09	296,45	23,59	175,96	199,55	237,44	160,65	398,09	137,19	160,65	297,84	137,19	160,65	297,84	137,19	160,65	297,84		
	d. Tanah									110,12	136,57	246,69	52,45	144,69	197,14	64,29	83,29	147,57	57,92	83,29	141,21	57,92	83,29	141,21	57,92	83,29	141,21		
	e. Perkerasan Beton									7,35	0,15	7,50	2,52	0,49	3,01	7,50	1,09	8,59	5,54	1,09	6,62	5,54	1,09	6,62	5,54	1,09	6,62		
	JUMLAH I	120,94	120,94	120,94	120,94	45,10	45,10	45,10	71,62	1462,00	410,87	1872,87	1548,92	410,87	1959,79	1532,58	410,87	1943,45	1414,12	410,87	1824,99	1414,12	410,87	1824,99	1414,12	410,87	1824,99		
II	KONDISI PERMUKAAN																												
	a. Baik	109,94	108,94	109,94	109,94	15,16	15,16	15,16	41,68	1135,77	84,96	1220,73	552,47	100,70	653,17	630,61	100,70	731,31	518,63	100,70	619,34	542,23	100,70	642,93	542,23	100,70	642,93		
	b. Sedang					1,00	1,00	1,00	1,00	24,57	12,12	36,69	296,34	2,62	298,96	296,34	2,62	298,96	265,79	2,62	268,42	248,00	2,62	250,62	248,00	2,62	250,62		
	c. Rusak	11,00	12,00	11,00	11,00	28,94	28,94	28,94	28,94	63,18	9,13	72,32	69,13	3,58	72,71	69,13	3,58	72,71	76,70	3,58	80,28	79,38	3,58	82,96	79,38	3,58	82,96		
	d. Rusak Berat					0,00	0,00	0,00	0,00	238,48	304,66	543,14	630,99	303,96	934,95	536,50	303,96	840,46	552,99	303,96	856,95	544,51	303,96	848,47	544,51	303,96	848,47		
	JUMLAH II	120,94	120,94	120,94	120,94	45,10	45,10	45,10	71,62	1462,00	410,87	1872,87	1548,92	410,87	1959,79	1532,58	410,87	1943,44	1414,12	410,87	1824,99	1414,12	410,87	1824,99	1414,12	410,87	1824,99		
III	KELAS JALAN																												
	a. Kelas I																												
	b. Kelas II	120,94	120,94	120,94	120,94	45,10	45,10	45,10	71,62																				
	c. Kelas III																												
	d. Kelas IIIA																												
	e. Kelas IIIB									67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00		
	f. Kelas IIIC									1395,00	410,87	1805,87	1481,92	410,87	1892,79	1465,58	410,87	1876,44	1347,12	410,87	1757,99	1347,12	410,87	1757,99	1347,12	410,87	1757,99		
	g. Kelas tidak dirinci																												
	JUMLAH III	120,94	120,94	120,94	120,94	45,10	45,10	45,10	71,62	1462,00	410,87	1872,87	1548,92	410,87	1959,79	1532,58	410,87	1943,44	1414,12	410,87	1824,99	1414,12	410,87	1824,99	1414,12	410,87	1824,99		

KEMANTAPAN JALAN TA 2024		
Baik	Mantap	55,88
Sengah		
Rusak	Tidak Mantap	44,12
Rusak Berat		

Tabel 3.3
Data Jalan dan Jembatan

NO	URAIAN	2025	KET
I	JUMLAH JEMBATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	172	Unit
II	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI JEMBATAN (PAKET)	3	Unit
III	ASET BARU	0	Unit

Tabel 3.4
Realisasi pembangunan jalan dan jembatan Tahun 2025

NO	JENIS KONSTRUKSI	SAT	2021	2022	2023	2024	2025
1	HRS	km	10,53	293,75	37,50	13,82	12,20
2	Lapen	km	29,29	1.266,35	34,73	18,39	58,20
3	Telford	km	7,65	199,55	1,13	0,6	0
4	Rabat/Paving/ Trotoar	km	0,85		4,416	1,33	2,74
5	Tanah (Pembukaan Jalan Baru)	km	5,7		3	12,36	3,00
6	Rehabilitasi	km	37,1	72,71	31,48	12,97	61,91
7	Pemeliharaan Jalan	km			2,4	0	9,6
	TOTAL		91,112	1.759,645	112,256	59,23	147,65



NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
I	Jumlah jembatan s.d tahun	282 unit	285 unit	288 unit	171 unit	172 unit
II	KONDISI JEMBATAN					
	a. Baik	276 unit	283 unit	288 unit	7 unit	8 unit
	b. Rusak Ringan	5 unit	1 unit	-	101 unit	101 unit
	c. Rusak Berat	1 unit	1 unit	-	63 unit	63 unit

3). **Sasaran 3:** Peningkatan persentase Drainase perkotaan yang dibangun;

Indikator dari sasaran ini adalah Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase} &= \frac{\text{Panjang saluran drainase terbangun (km)}}{\text{Panjang jalan kabupaten tahun 2025 (km)}} \times 100\% + \text{Kondisi tahun 2024} \\
 &= \frac{1,335}{1414,112 \text{ km}} \times 100\% + 72,82\% \\
 &= 72,92\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2025, ada 9 paket yang mendukung peningkatan persentase drainase perkotaan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Data Paket Pekerjaan Drainase pada Tahun 2025

No	Nama Paket 2024	Lokasi	Pekerjaan	Panjang Penanganan	Satuan
1	Pembangunan Drainase Perkotaan di Kawasan Rumah Sakit Pratama Reo	Reok	Drainase	296,00	meter
2	Pembangunan Drainase Perkotaan di sepanjang Jalur Umum Leda Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	93,00	meter
3	Pembangunan Drainase Perkotaan di Cewonikit RT 006 - RW 002 Kel. Pau Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	131,00	meter
4	Pembangunan Drainase Perkotaan di Ngawe RT 017 - RW 006 Kel. Pau Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	93,00	meter
5	Pembangunan Drainase Perkotaan di RT.001/RW.001, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	152,00	meter
6	Pembangunan Drainase Perkotaan di RT 012 RW 003 dan RT 038 RW 004 Kelurahan Karot, Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	105,00	meter
7	Pembangunan Drainase Perkotaan di RT 003, RT.005 Dan RT.006 Kel. Carep Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	131,00	meter
8	Pembangunan Drainase Perkotaan di RT 001, RT 003, RT 006, RT 008, RT 009 dan RT 011 Kelurahan Poco Mal Kecamatan Langke Rembong	Langke Rembong	Drainase	179,00	meter
9	Pembangunan Drainase Perkotaan di RT 016, RT 014, RT 013 dan RT 007 Kelurahan Tenda, Kab. Manggarai	Langke Rembong	Drainase	155,00	meter
	Total Panjang			1.335,00	meter

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2026



Target Persentase Drainase Perkotaan yang Dibangun pada tahun 2025 adalah 84,80 %. dengan realisasi sebesar 72,92 %, capaian kinerja terhadap target ini mencapai 85,99 %.

4). **Sasaran 4** : Persentase luas daerah terlayani irigasi primer;

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase luas daerah terlayani irigasi primer. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Luas D.I. yang terlayani irigasi primer (Ha)}}{\text{Luas Seluruh Daerah Irigasi (Ha)}} \times 100\% \\ &= \frac{17.645,01 \text{ Ha}}{19.833 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 88,97 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.6
Data Jaringan Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten

NO	IRIGASI	SAT.	TAHU N					KETERANGAN
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	71,60	72,26	86,86	87,94	88,97	
2	Rasio Jaringan Irigasi	Ratio	18,99	16,87	16,87	16,87	16,87	(Rasio Panjang saluran irigasi lahan terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian)
		%	80,28	90,36	90,36	90,36	90,36	bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi
3	Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan							
	a. Non Teknis (m)	m	177.258	174.737	174.737	161.520,15	157.898,27	
	b. Teknis (m)	m	125.111	127.632	134.886,8	140.848,85	144.470,73	
	- Primer	m	100.779,0	100.779,0	100.779,0	101.175,40	101.175,40	
	- Sekunder	m	22.921,00	25.442,20	32.696,81	38.118,58	41.740,47	
	- Tersier		1.411	1.411	1.411	1.554,87	1.554,87	
	c. Panjang jaringan (m)	m	302.369	302.369	302.369	302.369,00	302.369,00	
	d. Panjang yang tertangani (m)	m	3.821	2.521,2	7.254,61	8.483,24	3.621,89	
	e. Luas Irigasi (Ha)	Ha	19.833	19.833	19.833	19.833,00	19.833,00	
	f. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha)	Ha	14.209	14.330,99	17.226,94	17.441,01	17.645,01	
	g. Luas Irigasi yang tertangani (Ha)	Ha	566	121,99	2.895,95	214,06	204,00	

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, Jan 2026



Target Persentase luas daerah terlayani irigasi primer pada tahun 2025 adalah 95,84%. dengan realisasi sebesar 88,97%, capaian kinerja terhadap target ini mencapai 92,83%.

5). **Sasaran 5a** : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan;

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses sanitasi layak (RT)}}{\text{Jumlah seluruh RT daerah kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{84.786 \text{ KK}}{97.838 \text{ KK}} \times 100\% \\ &= 86,66 \% \end{aligned}$$

Target Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan pada tahun 2025 adalah 86,93%. dengan realisasi sebesar 86,66% , capaian kinerja terhadap target ini mencapai 99,69% dengan hasil kegiatan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Data Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

1. KECAMATAN WAE RI'I

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
1	SATAR NGKELING	2187	663	2.030	594	92,81	89,59
2	LALONG	1945	570	1.935	546	99,49	95,79
3	POCO	1.153	350	1.093	320	94,83	91,43
4	WAE MULU	2489	745	2.081	609	83,60	81,74
5	NDEHES	2293	680	2.081	609	90,75	89,56
6	GOLO CADOR	2.545	752	2.204	645	86,60	85,77
7	LONGKO	1.337	376	1.083	317	81,01	84,31
8	RANGGI	1604	469	1.486	435	92,67	92,75
9	COMPANG NDEHES	1.909	586	1.860	571	97,44	97,44
10	BANGKA JONG	1.349	383	1.015	297	75,23	77,55
11	BANGKA KENDA	2620	753	1.995	584	76,16	77,56
12	GOLO MENDO	1149	345	1.059	310	92,19	89,86
13	GOLO WUA	1062	325	940	275	88,48	84,62
14	WAE RII	2539	701	2.415	679	95,12	96,86
15	RANAKA	1918	519	1.500	411	78,21	79,19
16	GOLO WATU	2343	668	2.098	614	89,54	91,92
17	BENTENG POCO	1.139	335	1.088	324	95,52	96,72
		31.581	9.220	27.964	8.140	88,55	88,29



2. KECAMATAN RUTENG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
18	CUMBI	2.290	621	1.797	520	78,47	83,74
19	KAKOR	1.759	523	1.600	477	90,96	91,20
20	PONG MURUNG	3.325	963	2.616	757	78,68	78,61
21	WAE BELANG	3.722	1.088	3.649	1.056	98,05	97,06
22	BULAN	3.469	1.079	3.286	1.022	94,72	94,72
23	PONG LAO	2.110	587	2.000	566	94,79	96,42
24	BEO RAHONG	2.749	790	2.599	752	94,53	95,19
25	GOLO WOROK	1.913	535	1.621	469	84,72	87,66
26	MELER	2.943	820	2.290	645	77,81	78,66
27	BENTENG KUWU	2.991	825	2.450	709	81,92	85,94
28	BELANG TURI	2.068	602	1.894	548	91,58	91,03
29	PONG LEKO	1.976	572	1.856	537	93,91	93,88
30	RAI	2.397	663	2.000	549	83,44	82,81
31	POCO LIKANG	2.430	660	1.700	476	69,96	72,12
32	BANGKA LAO	2.450	722	2.288	662	93,38	91,69
33	COMPANG DALO	2.286	631	1.728	500	75,59	79,24
34	BEA KAKOR	1.804	538	1.692	476	93,79	88,48
35	COMPANG NAMUT	1.746	562	1.600	521	91,64	92,70
36	PONG LALE	911	289	870	271	95,50	93,77
		45.339	13.070	39.535	11.513	87,20	88,09

3. KECAMATAN SATARMESE

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
37	JAONG	1.071	315	730	214	68,16	67,94
38	PONGKOR	1.931	579	1660	508	85,97	87,74
39	WAE AJANG	2.060	553	1482	414	71,94	74,86
40	PAPANG	2.469	714	2116	591	85,69	82,77
41	WEWO	2.549	688	2048	572	80,33	83,14
42	LUNGAR	1.547	400	1260	333	81,45	83,25
43	MOCOK	1.712	480	1414	395	82,59	82,29
44	KOAK	1.955	479	1461	408	74,71	85,18
45	LANGGO	1.643	449	1346	376	81,92	83,74
46	LEGU	2.379	660	2278	620	95,75	93,94
47	PAKA	1.903	530	1725	482	90,67	90,94
48	TAL	2.141	574	1760	479	82,20	83,45
49	GOLO LAMBO	898	253	684	191	76,14	75,49
50	NGKAER	1.000	288	920	265	92,01	92,01
51	UMUNG	1.858	521	1604	448	86,31	85,99
52	TADO	1.066	301	619	173	58,10	57,48
53	GARA	1.208	347	1208	346	100,00	99,71
54	GOLO MUNTAS	1.435	384	1289	360	89,81	93,75
55	PONGGEOK	1.497	417	1418	396	94,69	94,96
56	ITENG	1.235	353	1214	339	98,26	96,03
57	SATAR LOUNG	1.187	329	1095	306	92,28	93,01
58	LOLANG	1.900	548	1554	434	81,77	79,20
59	ULU BELANG	1.279	390	1184	361	92,56	92,56
		37.923	10.552	32.067	9.011	84,56	85,40



4. KECAMATAN CIBAL

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
60	NENU	2.417	717	2.267	684	93,78	95,40
61	RADO	1.622	472	1.349	407	83,16	86,23
62	WUDI	1.828	512	1.612	463	88,18	90,43
63	WELU	2.228	628	1.740	525	78,09	83,60
64	GOLO	1.590	472	782	236	49,19	50,00
65	BARANG	1.400	422	1.302	393	93,03	93,13
66	PERAK	1.436	453	868	262	60,46	57,84
67	BEA MESE	1.346	409	931	281	69,19	68,70
68	LANGKAS	1.385	430	765	211	55,23	49,07
69	LADUR	1.912	605	782	236	40,91	39,01
70	KENTOL	1.143	353	1.143	353	100,00	100,00
71	RIUNG	2.233	662	2.111	637	94,54	96,22
72	PINGGANG	1.633	470	862	260	52,76	55,32
73	LANDO	932	326	615	216	65,99	66,26
74	GAPONG	1.287	392	1.287	392	100,00	100,00
75	PAGAL	2.366	695	2.174	656	91,88	94,39
76	GOLO NCUANG	1.345	396	1.345	396	100,00	100,00
		28.103	8.414	21.935	6.608	78,05	78,54

5. KECAMATAN REOK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
77	ROBEK	2161	628	1.597	471	73,91	75,00
78	RUIS	2.123	597	1.923	567	90,56	94,97
79	BAJAK	1498	435	865	255	57,72	58,62
80	WATU BAUR	705	205	654	193	92,83	94,15
81	SALAMA	2.094	611	1.553	458	74,17	74,96
82	WATU TANGO	1.176	328	1.202	280	102,21	85,37
83	REO	2.479	803	2.451	794	98,88	98,88
84	MATA AIR	2.562	796	2.504	778	97,74	97,74
85	BARU	1.859	569	1.780	525	95,76	92,27
86	WANGKUNG	3.639	1.036	2.513	741	69,05	71,53
		20.296	6.008	17.042	5.062	83,97	84,25

6. KECAMATAN SATARMESE BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
87	HILIHINTIR	3.279	937	3.188	915	97,22	97,65
88	BEA KONDO	1904	521	1.324	380	69,54	72,94
89	GOLO ROPONG	1.295	398	1.170	362	90,35	90,95
90	TERONG	2.007	602	1.899	545	94,61	90,53
91	CEKA LUJU	988	290	735	211	74,41	72,76
92	SATAR LUJU	1.751	495	1.362	391	77,80	78,99
93	SATAR LENDA	2.374	665	2.212	635	93,19	95,49
94	SATAR RUWUK	1.469	420	1.234	349	84,00	83,10
95	NUCA MOLAS	1.403	393	1.084	311	77,23	79,13
96	BORIK	1.039	314	850	262	81,81	83,44
97	CAMBIR LECA	2.593	730	2.593	730	100,00	100,00
148	WONGKA	932	253	932	250	100,00	98,81



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
		21.034	6.018	18.583	5.341	88,35	88,75

7. KECAMATAN RAHONG UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
99	BUAR	2.592	759	1.224	361	47,22	47,56
100	BENTENG TUBI	1.647	507	492	145	29,85	28,60
101	COMPANG DARI	1.497	448	1.244	367	83,11	81,92
102	DIMPONG	1.408	455	1.265	373	89,81	81,98
103	BANGKA AJANG	2.252	642	1.875	537	83,26	83,64
104	LIANG BUA	2.570	756	1.678	495	65,30	65,48
105	TENGKU LESE	2.305	678	1.858	548	80,60	80,83
106	GOLO LANGKOK	2.746	796	2.329	687	84,82	86,31
107	PONG LENGOR	2.540	736	1.373	405	54,06	55,03
108	MANONG	1.596	482	1.217	359	76,26	74,48
109	BANGKA RUANG	1.666	474	1.119	330	67,15	69,62
110	WAE MANTANG	1.740	482	1.160	325	66,67	67,43
		24.559	7.215	16.833	4.932	68,54	68,36

8. KECAMATAN LELAK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
111	BANGKA LELAK	2.297	672	1.506	437	65,54	65,03
112	GELONG	1.295	377	665	193	51,34	51,19
113	URANG	1.536	447	572	166	37,23	37,14
114	KETANG	1.530	460	744	216	48,64	46,96
115	PONG UMPU	1.122	336	665	193	59,26	57,44
116	BANGKA DESE	729	215	386	112	52,93	52,09
117	NATI	863	243	837	234	96,99	96,30
118	NDIWAR	1.048	309	924	251	88,17	81,23
119	BANGKA TONGGUR	910	267	513	149	56,41	55,81
120	LENTANG	1.931	508	775	207	40,13	40,75
		13.261	3.834	7.587	2.158	57,21	56,29

9. KECAMATAN REOK BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
121	RURA	1676	470	561	313	33,47	66,60
122	KAJONG	2536	718	921	514	36,32	71,59
123	TOE	1108	307	1.004	261	90,61	85,02
124	LOCE	2339	657	806	450	34,48	68,49
125	SAMBI	2049	582	414	231	20,20	39,69
126	LANTE	1265	380	600	335	47,46	88,16
127	NGGALAK	1785	487	1.759	466	98,54	95,69
128	PARA LANDO	100	304	457	255	456,96	83,88
129	LEMARANG	893	251	400	223	44,75	88,84
130	TORONG KOE	1123	315	321	179	28,56	56,83
		14874	4471	7.243	3.227	48,70	72,18



10. KECAMATAN CIBAL BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
131	TIMBU	1768	565	1.768	565	100,00	100,00
132	GOLO WOI	1298	365	1.225	347	94,38	95,07
133	BANGKA ARA	706	226	706	226	100,00	100,00
134	WAE RENCA	2137	631	2.001	596	93,64	94,45
135	WAE CODI	2058	571	1.980	548	96,21	95,97
136	LATUNG	1519	418	1.430	400	94,14	95,69
137	COMPANG CIBAL	1429	462	1.349	436	94,37	94,37
138	LENDAL	1802	521	1.662	495	92,23	95,01
139	BERE	2572	750	2.473	721	96,13	96,13
140	GOLO LANAK	1335	408	1.335	408	100,00	100,00
		16624	4917	15.928	4.742	95,81	96,44

11. KECAMATAN LANGKE REMBONG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
141	BANGKA NEKANG	2.432	1.096	2.414	1.088	99,27	99,27
142	MBAUMUKU	3.055	1.398	2.987	1.367	97,78	97,78
143	PITAK	4.787	1.354	4.366	1.287	91,21	95,05
144	KAROT	4.581	1.403	4.320	1.293	94,30	92,16
145	WATU	5.345	522	5.345	522	100,00	100,00
146	POCO MAL	1.757	2.508	1.680	2.365	95,62	94,30
147	COMPANG CAREP	1.004	1.045	895	972	89,14	93,01
148	LACI CAREP	970	194	950	190	97,94	97,94
149	TADONG	1.697	951	1.650	930	97,23	97,79
150	SATAR TACIK	5.006	1.161	4.378	1.020	87,46	87,86
151	CAREP	3.036	921	2.775	818	91,40	88,82
152	TENDA	3.501	803	3.292	755	94,02	94,02
153	ROWANG	1.033	1.357	976	1.271	94,48	93,66
154	WASO	3.727	461	3.456	424	92,73	91,97
155	COMPANG TUKE	2.374	252	2.175	229	91,62	90,87
156	LAWIR	1.650	254	1.592	245	96,46	96,46
157	BANGKA LEDA	2.882	448	2.700	404	93,68	90,18
158	PAU	8.210	292	7.490	260	91,23	89,04
159	WALI	4.918	763	4.200	654	85,40	85,71
160	GOLO DUKAL	3.729	645	3.580	614	96,00	95,19
		65.694	17.828	61.221	16.708	93,19	93,72

12. KECAMATAN SATARMESE UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
161	RENDA	1.626	473	1.093	317	67,23	67,02
162	TODO	1.419	402	845	245	59,54	60,95
163	GULUNG	1.830	528	1.310	380	71,61	71,97
164	POPO	1.518	460	1.035	300	68,15	65,22
165	LIA	1.514	456	1.110	315	73,32	69,08
166	KOLE	1.618	470	1.466	425	90,58	90,43
167	LING	1.257	385	731	212	58,16	55,06



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
168	NAO	1.840	523	1.393	404	75,72	77,25
169	CIRENG	1.623	458	1.207	350	74,37	76,42
170	RUANG	1.281	351	817	237	63,80	67,52
171	MATA WAE	1.365	390	666	193	48,76	49,49
		16.891	4.896	11.673	3.378	69,11	69,00
TOTAL PERSENTASE		JIWA (%) = 82,58		RT sanitasi		= 97.838	
KAB. MANGGARAI		KK (%) = 83,80		RT seluruh		= 81.988	
				% RT Terlayani		= 83,80%	

6). **Sasaran 5b** : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan;

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan. Realisasi capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses air minum (RT)}}{\text{Jumlah seluruh RT daerah kabupaten}} \times 100\% \\
 &= \frac{86.019 \text{ KK}}{97.838 \text{ KK}} \times 100\% \\
 &= 87,92 \%
 \end{aligned}$$

Pendayagunaan air bersih/air minum yang dilaksanakan Dinas PUPR adalah melalui pembangunan, peningkatan/perluasan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan air bersih/air minum serta operasi dan pemeliharaan jaringan air minum. Capaian hingga akhir tahun 2025 total penduduk yang terlayani air minum bersih adalah 86.019 Rumah Tangga, atau 87,92% dari 97.838 Total Rumah Tangga.

Untuk mengukur keberhasilan program kegiatan SPAM berikut tabel realisasi capain program perkecamatan :

Tabel 3.8

Data Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak

1. KECAMATAN WAE RI'I

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
1	SATAR NGKELING	2187	663	2.187	663	100	100
2	LALONG	1945	570	1.945	570	100	100
3	POCO	1.153	350	1.153	350	100	100
4	WAE MULU	2489	745	1.770	532	71,11	71,41
5	NDEHES	2293	680	2293	680	100	100
6	GOLO CADOR	2.545	752	2.545	752	100	100
7	LONGKO	1.337	376	1.337	376	100	100
8	RANGGI	1604	469	1.604	469	100	100



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
9	COMPANG NDEHES	1.909	586	1.909	586	100	100
10	BANGKA JONG	1.349	383	1.126	324	83,47	84,60
11	BANGKA KENDA	2620	753	2.620	753	100	100
12	GOLO MENDO	1149	345	1149	345	100	100
13	GOLO WUA	1062	325	475	180	44,73	55,38
14	WAE RII	2539	701	2539	701	100	100
15	RANAKA	1918	519	1.650	448	86,03	86,32
16	GOLO WATU	2343	668	2084	418	88,95	62,57
17	BENTENG POCO	1.139	335	660	308	57,95	91,94
		31.581	9.220	29.046	8.455	91,97	91,70

2. KECAMATAN RUTENG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
38	CUMBI	2.290	621	2.290	621	100	100
39	KAKOR	1.759	523	1.759	523	100	100
40	PONG MURUNG	3.325	963	3.325	963	100	100
41	WAE BELANG	3.722	1.088	3.722	1.088	100	100
42	BULAN	3.469	1.079	2715	820	78,26	76,00
43	PONG LAO	2.110	587	1000	265	47,39	45,14
44	BEO RAHONG	2.749	790	2.749	790	100	100
45	GOLO WOROK	1.913	535	1.913	535	100	100
46	MELER	2.943	820	2663	770	90,49	93,90
47	BENTENG KUWU	2.991	825	2.991	825	100	100
48	BELANG TURI	2.068	602	2.068	602	100	100
49	PONG LEKO	1.976	572	1.413	420	71,51	73,43
50	RAI	2.397	663	898	230	37,46	34,69
51	POCO LIKANG	2.430	660	2.219	640	91,32	96,97
52	BANGKA LAO	2.450	722	1798	450	73,39	62,33
53	COMPANG DALO	2.286	631	1905	537	83,33	85,10
54	BEA KAKOR	1.804	538	1.804	538	100	100
55	COMPANG NAMUT	1.746	562	1.140	330	65,29	58,72
56	PONG LALE	911	289	911	289	100	100
		45.339	13.070	39.283	11.236	86,64	85,97

3. KECAMATAN SATARMESE

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
57	JAONG	1.071	315	1.071	315	100	100
58	PONGKOR	1.931	579	1.931	579	100	100
59	WAE AJANG	2.060	553	2.060	553	100	100
60	PAPANG	2.469	714	1.959	680	79,34	95,24
61	WEWO	2.549	688	2.041	530	80,07	77,03
62	LUNGAR	1.547	400	1.547	400	100,00	100,00
63	MOCOK	1.712	480	1.027	270	59,99	56,25
64	KOAK	1.955	479	1.850	470	94,63	98,12
65	LANGGO	1.643	449	1.643	449	100	100
66	LEGU	2.379	660	2.233	623	93,86	94,39



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
67	PAKA	1.903	530	1.903	530	100	100
68	TAL	2.141	574	2.141	574	100	100
69	GOLO LAMBO	898	253	898	253	100	100
70	NGKAER	1.000	288	920	273	92,00	94,79
71	UMUNG	1.858	521	1.858	521	100	100
72	TADO	1.066	301	1.066	301	100	100
73	GARA	1.208	347	1.208	347	100	100
74	GOLO MUNTAS	1.435	384	1.435	384	100	100
75	PONGGEOK	1.497	417	1.497	417	100	100
76	ITENG	1.235	353	1.235	353	100	100
77	SATAR LOUNG	1.187	329	1.187	329	100,00	100,00
78	LOLANG	1.900	548	924	274	48,63	50,00
79	ULU BELANG	1.279	390	476	150	37,22	38,46
		37.923	10.552	34.110	9.575	89,95	90,74

4. KECAMATAN CIBAL

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
80	NENU	2.417	717	2.417	717	100	100
81	RADO	1.622	472	1.622	472	100	100
82	WUDI	1.828	512	1.134	340	62,04	66,41
83	WELU	2.228	628	1.460	440	65,53	70,06
84	GOLO	1.590	472	1.510	450	94,97	95,34
85	BARANG	1.400	422	1.400	422	100	100
86	PERAK	1.436	453	1.436	453	100	100
87	BEA MESE	1.346	409	1.187	360	88,19	88,02
88	LANGKAS	1.385	430	1.062	334	76,68	77,67
89	LADUR	1.912	605	1.549	445	81,01	73,55
90	KENTOL	1.143	353	1.143	353	100	100
91	RIUNG	2.233	662	2.233	662	100	100
92	PINGGANG	1.633	470	1.633	470	100	100
93	LANDO	932	326	932	326	100	100
94	GAPONG	1.287	392	1.287	392	100	100
95	PAGAL	2.366	695	2.021	591	85,42	85,04
96	GOLO NCUANG	1.345	396	1.137	325	84,54	82,07
		28.103	8.414	25.163	7.552	89,54	89,76

5. KECAMATAN REOK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
97	ROBEK	2161	628	1.611	466	74,55	74,20
98	RUIS	2.123	597	2.123	597	100	100
99	BAJAK	1498	435	779	224	52,00	51,49
100	WATU BAUR	705	205	705	205	100	100
101	SALAMA	2.094	611	780	240	37,25	39,28
102	WATU TANGO	1.176	328	1.176	328	100	100
103	REO	2.479	803	2.479	803	100	100
104	MATA AIR	2.562	796	1.698	530	66,28	66,58
105	BARU	1.859	569	1.859	569	100	100



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
106	WANGKUNG	3.639	1.036	687	205	18,88	19,79
		20.296	6.008	13.897	4.167	68,47	69,36

6. KECAMATAN SATARMESE BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
107	HILIHINTIR	3.279	937	3.279	937	100	100
108	BEA KONDO	1904	521	1.631	449	85,66	86,18
109	GOLO ROPONG	1.295	398	1.295	398	100	100
110	TERONG	2.007	602	828	251	41,26	41,69
111	CEKA LUJU	988	290	988	290	100	100
112	SATAR LUJU	1.751	495	742	208	42,38	42,02
113	SATAR LENDA	2.374	665	1.775	490	74,77	73,68
114	SATAR RUWUK	1.469	420	1.068	303	72,70	72,14
115	NUCA MOLAS	1.403	393	1.122	312	79,97	79,39
116	BORIK	1.039	314	595	120	57,27	38,22
117	CAMBIR LECA	2.593	730	1.700	500	65,56	68,49
118	WONGKA	932	253	932	253	100,00	100,00
		21.034	6.018	15.955	4.511	75,85	74,96

7. KECAMATAN RAHONG UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
119	BUAR	2.592	759	1.696	474	65,43	62,45
120	BENTENG TUBI	1.647	507	1.647	507	100	100
121	COMPANG DARI	1.497	448	1.497	448	100	100
122	DIMPONG	1.408	455	1.408	455	100	100
123	BANGKA AJANG	2.252	642	1.100	311	48,85	48,44
124	LIANG BUA	2.570	756	1.888	550	73,46	72,75
125	TENGKU LESE	2.305	678	1.998	589	86,68	86,87
126	GOLO LANGKOK	2.746	796	1.978	574	72,03	72,11
127	PONG LENGOR	2.540	736	2.540	736	100	100
128	MANONG	1.596	482	764	273	47,87	56,64
129	BANGKA RUANG	1.666	474	1.147	327	68,85	68,99
130	WAE MANTANG	1.740	482	1.299	400	74,66	82,99
		24.559	7.215	18.962	5.644	77,21	78,23

8. KECAMATAN LELAK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
131	BANGKA LELAK	2.297	672	2.297	672	100	100
132	GELONG	1.295	377	1.295	377	100	100
133	URANG	1.536	447	1.536	447	100	100
134	KETANG	1.530	460	1.210	367	79,08	79,78
135	PONG UMPU	1.122	336	1.122	336	100	100
136	BANGKA DESE	729	215	729	215	100	100
137	NATI	863	243	863	243	100	100



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
138	NDIWAR	1.048	309	1.048	309	100	100
139	BANGKA TONGGUR	910	267	910	267	100	100
140	LENTANG	1.931	508	1.931	508	100	100
		13.261	3.834	12.941	3.741	97,59	97,57

9. KECAMATAN REOK BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
141	RURA	1676	470	1.383	367	82,52	78,09
142	KAJONG	2536	718	1076	313	42,43	43,59
143	TOE	1108	307	350	100	31,59	32,57
144	LOCE	2339	657	262	82	11,20	12,48
145	SAMBI	2049	582	1130	340	55,15	58,42
146	LANTE	1265	380	780	230	61,66	60,53
147	NGGALAK	1785	487	1139	320	63,81	65,71
148	PARA LANDO	100	304	100	304	100	100
149	LEMARANG	893	251	893	251	100	100
150	TORONG KOE	1123	315	1123	315	100	100
		14874	4471	8.236	2.622	55,37	58,64

10. KECAMATAN CIBAL BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
151	TIMBU	1768	565	1.181	397	66,80	70,27
152	GOLO WOI	1298	365	1.298	365	100	100
153	BANGKA ARA	706	226	706	226	100	100
154	WAE RENCA	2137	631	1.495	460	69,96	72,90
155	WAE CODI	2058	571	1.840	544	89,41	95
156	LATUNG	1519	418	439	126	28,90	30,14
157	COMPANG CIBAL	1429	462	986	315	69,00	68,18
158	LENDA	1802	521	1.376	408	76,36	78,31
159	BERE	2572	750	1.200	288	46,66	38,40
160	GOLO LANAK	1335	408	250	50	18,72659176	12,25490196
		16624	4917	10.771	3.179	64,79	64,65

11. KECAMATAN LANGKE REMBONG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
18	GOLO DUKAL	2.432	1.096	2.432	1.096	100	100
19	WALI	3.055	1.398	3.055	1.398	100	100
20	KAROT	4.787	1.354	4.787	1.354	100	100
21	PITAK	4.581	1.403	4.581	1.403	100	100
22	LAWIR	5.345	522	5.345	522	100	100
23	PAU	1.757	2.508	1.757	2.508	100	100
24	WASO	1.004	1.045	1.004	1.045	100	100
25	WATU	970	194	970	194	100	100
26	MBAUMUKU	1.697	951	1.697	951	100	100
27	TENDA	5.006	1.161	5.006	1.161	100	100
28	CAREP	3.036	921	3.036	921	100	100
29	BANGKA NEKANG	3.501	803	3.501	803	100	100
30	SATAR TACIK	1.033	1.357	1.033	1.357	100	100



NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
31	POCO MAL	3.727	461	3.727	461	100	100
32	COMPANG CAREP	2.374	252	2.374	252	100	100
33	LACI CAREP	1.650	254	1.650	254	100	100
34	TADONG	2.882	448	2.882	448	100	100
35	ROWANG	8.210	292	8.210	292	100	100
36	BANGKA LEDA	4.918	763	4.918	763	100	100
37	COMPANG TUKE	3.729	645	3.729	645	100	100
		65.694	17.828	65.694	17.828	100	100

12. KECAMATAN SATARMESE UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
161	RENDAN	1.626	473	1.626	473	100	100
162	TODO	1.419	402	1.419	402	100	100
163	GULUNG	1.830	528	1.830	528	100	100
164	POPO	1.518	460	1.518	460	100	100
165	LIA	1.514	456	1.514	456	100	100
166	KOLE	1.618	470	1.618	470	100	100
167	LING	1.257	385	827	243	65,79	63,12
168	NAO	1.840	523	1.840	523	100	100
169	CIRENG	1.623	458	1.362	388	83,92	84,72
170	RUANG	1.281	351	702	176	54,80	50,14
171	MATA WAE	1.365	390	1.365	390	100	100
		16.891	4.896	15.621	4.509	92,48	92,10

TOTAL PERSENTASE **JIWA (%) = 82,58** **RT sanitasi** **= 97.838**
KAB. MANGGARAI **KK (%) = 83,80** **RT seluruh** **= 81.988**
% RT Terlayani **= 83,80%**

Tabel 3.9
Persentase penduduk yang terlayani air minum bersih
Tahun 2016-2025

TAHUN	JLH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM BERSIH
2016	251.629 jiwa
2017	252.083 jiwa
2018	263.691 jiwa
2019	270.374 jiwa
2020	282.413 jiwa
2021	281.094 jiwa
2022	282.340 jiwa
2023	333.730 jiwa
2024	336.179 jiwa
2025	337.059 jiwa



7). Sasaran 6 : Meningkatnya Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali ;

Untuk mendapatkan nilai indikator Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali membutuhkan beberapa faktor yang perlu diperhitungkan masing-masing dengan target sesuai RPJMD Kab Manggarai 2021-2026 sbb :

- a. Permohonan informasi tata ruang : Target 3077 Informasi
- b. Dokumen (RTRW kab. Manggarai) : 1 Dokumen
- c. Dokumen (RDTR) di kab. Manggarai : 7 Dokumen
- d. Pemasangan plang keg. insentif/disinsentif RTRW : 36 unit

Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : indikasi arahan zonasi dalam RTRW provinsi atau ketentuan umum zonasi dalam RTRW kabupaten/kota, arahan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi atau ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW kab./kota, arahan sanksi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian, dan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Rumus indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} : = \left(\frac{\text{Realisasi (a)}}{\text{Target (a)}} + \frac{\text{Realisasi (B)}}{\text{Target (B)}} + \frac{\text{Realisasi (C)}}{\text{Target (C)}} + \frac{\text{Realisasi (D)}}{\text{Target (D)}} \right) \times \frac{\text{Target Akhir RPJMD}}{\text{Jumlah Faktor}} \times 100\%$$

$$= \left(\frac{339}{3077} + \frac{1}{1} + \frac{2}{7} + \frac{23}{36} \right) \times 62\% \times 100\%$$

$$= 43,28\%$$

keterangan :

- (a) : Permohonan informasi tata ruang
- (b) : Dokumen (RTRW kab. Manggarai)
- (c) : Dokumen (RDTR) di kab. Manggarai
- (d) : Pemasangan plang keg. insentif/disinsentif RTRW

Perhitungan indikator ini ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Data Indikator Cakupan Pemanfaatan Ruang

NO	JENIS KEGIATAN	REALISASI s/d 2025	SATUAN	TARGET RPJMD 2021- 2026	PRESENTAS E REALISASI (x 62% akhir RPJMD)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c)/(e) x 100% x 62%
1	PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG	339	BANGUNAN	3.077	6,83%%



NO	JENIS KEGIATAN	REALISASI s/d 2025	SATUAN	TARGET RPJMD 2021- 2026	PRESENTAS E REALISASI (x 62% akhir RPJMD)
2	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW KAB. MANGGARAI)	1	DOKUMEN PERDA/RANPERDA	1	62,00 %
3	DOKUMEN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAB. MANGGARAI	2	DOKUMEN PERKADA / RANPERKADA	7	16,67 %
4	PEMASANGAN PLANG DALAM KEGIATAN INSENTIF/DISINSENTIF RTRW	23	PLANG	36	39,61%
CAPAIAN RATA-RATA TAHUN 2025					31,277%
CAPAIAN KERJA S.D TAHUN 2025 (+12% nilai Kondisi Awal RPJMD)					43,28%

Target Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali pada tahun 2025 adalah 42%. Capaian Kinerja untuk indikator ini sbb :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja tahun 2025} &= \frac{43,28}{52,00} \times 100\% \\ &= 83,23\% \end{aligned}$$

3.2.2 Perbandingan Indikator Kinerja

Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 6 program strategis dan 1 program pendukung dengan rekapitulasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11
Data Perbandingan antara Indikator Kinerja Per Tahun dan antara target akhir RPJMD Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	REALISASI (%)						Target Akhir RPJMD 2026 (%)	% Capaian Thdp Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
PROGRAM DASAR											
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	16,60	21,19	33,33	33,33	33,62		58,60	56,88
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	53,21	48,58	56,53	55,47	55,88		67,88	81,72
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen	72	72,31	72,45	72,82	72,92		88	82,75
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	77	72,26	86,860	87,94	88,97		100	87,94
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	74,03	83,13	83,30	83,80	86,66		89,872	93,24



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	REALISASI (%)						Target Akhir RPJMD 2026 (%)	% Capaian Thdp Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	86	85,81	86,00	86,08	87,92		93	92,56
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	26,58	28,50	31,849	32,65	34,31		41,67	78,35
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	12	23,183	36,06	40,77	43,28		62	65,76
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,0058	0,0091	0,0133	0,014	0,016		0,036	38,89
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	25	57,80	99,65	100,00		95	104,89
	PROGRAM PENDUKUNG	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen	95	96	97	98	99		100	98,00
	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	Persen	100	100	100	100	100		100	100,00
	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100		100	100,00
	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Persentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100		100	100,00
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100		100	100,00

3.2.3 Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan tabel 3.11 diatas dapat dijelaskan penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi sebagai berikut :

- Pada indikator kinerja Persentase kawasan yang memiliki bangunan pengendali bencana, indikator terus mengalami kenaikan setiap tahun,
- Pada indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, kondisi cenderung naik turun, dimana pada tahun 2022



persentase menurun dari kondisi awal 53,21% menjadi 48,58%, dikarenakan refocusing anggaran untuk pembiayaan covid, sehingga dana untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan diturunkan, mengakibatkan ruas jalan yang perlu di rehab dan dipelihara tidak dapat dikerjakan. Hal ini membuat kondisi jalan mantap menjadi menurun. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 56,53% karena didukung dengan dana DAUSG, DAK, dan Dana Pinjaman Daerah yang berfokus juga pada sektor jalan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase menjadi 55,47%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan persentase ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024, telah disahkan SK Baru yakni Keputusan Bupati Manggarai Nomor 159 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Manggarai. Hal ini menyebabkan panjang jalan kabupaten mengalami perubahan awalnya sepanjang 1532,58 km menjadi 1414,12 km. hal ini dijelaskan secara singkat bahwa ada aset jalan kabupaten yang dialihkan ke jalan provinsi sepanjang 40,72 km (ruas jalan sp. Cumbi-iteng) sesuai Keputusan Gubernur NTT No. 403/KEP/HK/2023. Sisa panjang lainnya telah dikoreksi pada data perencanaan yang mendukung Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 159 Tahun 2024, dengan menggunakan perhitungan yang lebih akurat baik dengan survey langsung maupun perhitungan data GIS Jalan sehingga memperbaiki data awal pada SK Jalan Kabupaten yang sebelumnya yang menggunakan metode manual dalam perhitungan rekapitulasi panjang jalan. Panjang jalan kabupaten merupakan faktor pembagi yang mempengaruhi perhitungan persentase kondisi jalan mantap.
2. Data pendukung SK Jalan terbaru tidak hanya memuat total panjang jalan kabupaten tetapi juga dengan data kondisi jalan terbaru sampai dengan tahun 2024. Setelah dilakukan perbandingan, telah ditelusuri banyaknya jalan yang awalnya terdata dalam kondisi baik pada tahun-tahun sebelumnya ternyata



sudah dalam kondisi rusak. Update data telah menunjukkan kondisi nyata jalan kabupaten pada saat ini. Dengan data dasar yang baru ini, dapat menjadi acuan bagi Dinas PUPR untuk memprioritaskan ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak untuk diperbaiki sehingga dapat berpengaruh pada tingkat kinerja indikator.

- Pada indikator kinerja Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun, indikator terus mengalami kenaikan realisasi kinerja.
- Pada indikator kinerja Persentase luas daerah terlayani irigasi primer, indikator terus mengalami kenaikan kinerja.
- Pada indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan, indikator terus mengalami kenaikan kinerja.
- Pada indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan, indikator terus mengalami kenaikan kinerja.
- Pada indikator kinerja Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman, indikator terus mengalami kenaikan kinerja.
- Pada indikator kinerja Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali, indikator terus mengalami kenaikan kinerja.
- Pada indikator kinerja Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan, indikator terus mengalami kenaikan kinerja.
- Pada indikator kinerja Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi, indikator terus mengalami kenaikan kinerja, yang cukup signifikan dan melampaui target RPJMD akhir tahun 2026. Target indikator kinerja pada 2026 pada RPJMD adalah



95%. Sementara kondisi pada tahun 2024 berada pada persentase 99,65%. Hal ini disebabkan karena dalam perhitungan RPJMD, Dinas menargetkan tenaga operator/teknisi/ analis memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 30 orang setiap tahunnya, sehingga pada akhir RPJMD setidaknya ditargetkan 143 orang dapat memiliki sertifikasi. Pada realisasinya, dengan kerjasama antara Dinas PUPR dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2024 dinas PUPR telah melakukan pelatihan kepada 150 orang tenaga ahli untuk mendapatkan sertifikat. Ini merupakan hal yang baik dan terus tingkatkan oleh dinas PUPR sehingga indikator ini dapat terus naik pada tren persentase yang positif.

3.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2024, sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dilakukan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya menurut beberapa sasaran. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan target dan realisasi setiap tahun. Berikut adalah beberapa poin penting:

1. Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana

Realisasi dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan, meskipun progres tahunan cenderung stagnan pada tahun 2023–2024. Hal ini menandakan potensi kendala sumber daya, baik finansial maupun teknis, dalam pelaksanaan program pembangunan bangunan pengendali bencana.

2. Akses dan Kualitas Jaringan Jalan

Persentase jalan dalam kondisi mantap mengalami fluktuasi dengan penurunan di tahun 2022 (48,58%) sebelum kembali meningkat. Fluktuasi ini telah dijelaskan pada poin Analisis Penyebab indikator kinerja yang fluktuatif.

3. Jaringan Drainase Perkotaan

Peningkatan kecil dalam pembangunan drainase menunjukkan upaya yang konsisten, namun dengan laju peningkatan yang lambat. Efisiensi



dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan proyek akan ditinjau lebih lanjut.

4. Infrastruktur Pengairan Lahan

Progres layanan irigasi primer meningkat signifikan hingga tahun 2024 (87,94%), menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya di sektor ini.

5. Akses terhadap Permukiman Layak Huni

Akses terhadap sanitasi dan air minum layak menunjukkan pertumbuhan stabil, sementara jalan lingkungan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang relatif lambat.

6. Tata Bangunan dan Penataan Ruang

Persentase pemanfaatan ruang yang terkendali dan bangunan dengan IMB menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan sumber daya terkait regulasi tata ruang.

7. Program Pendukung dan Administrasi

Semua indikator administrasi menunjukkan efisiensi maksimal, dengan realisasi 100% untuk penyusunan dokumen, kepegawaian, dan pelayanan kantor.

3.2.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa analisis umum yang dilakukan untuk mengukur tingkat Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Penunjang Keberhasilan

- Program Irigasi Primer: Pencapaian tinggi menunjukkan keberhasilan alokasi sumber daya yang optimal dan dukungan teknis yang baik.
- Pelayanan Administrasi: Realisasi 100% menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola internal yang efisien dan sesuai standar.
- Peningkatan Tata Bangunan dan Penataan Ruang: Capaian persentase pemanfaatan ruang yang terkendali menandakan efektivitas program pengawasan dan regulasi.



2. Faktor Penghambat atau Kegagalan

- Jaringan Jalan: Penurunan realisasi pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan atau implementasi indikator kinerja tetap pada target.
- Drainase Perkotaan: Laju peningkatan yang lambat menunjukkan adanya potensi kendala teknis atau finansial dalam pengembangan infrastruktur drainase.
- Bangunan Pengendali Bencana: Stagnasi dalam peningkatan pada tahun 2023–2024 dapat mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi alokasi sumber daya.

3. Rekomendasi

- Optimalisasi Perencanaan Proyek: Evaluasi ulang kebutuhan sumber daya, prioritas kinerja yang mendukung indikator, dan mitigasi risiko.
- Peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Memperkuat sistem pengawasan untuk mendeteksi masalah lebih awal.
- Penguatan Kapasitas Teknis dan Sumber Daya: Memberikan pelatihan teknis untuk operator/teknisi dan memastikan sumber daya memadai.
- Koordinasi Antar-Instansi: Meningkatkan sinergi antara dinas maupun dengan instansi vertikal terkait yang dapat mendukung peningkatan kinerja indikator.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efisiensi sumber daya meningkat dan target akhir RPJMD 2026 dapat tercapai dengan lebih optimal.

3.3 REALISASI ANGGARAN

3.3.1 Target dan Realisasi Anggaran

Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 9 program, 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 112.569.730.026 dan terealisasi sebesar Rp. 104.726.058 (93,03%). Ringkasan belanja Dinas PUPR Kabupaten Manggarai tahun 2025 seperti tabel berikut:



Tabel 3.12.
Realisasi Pendapatan Dinas PUPR Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
	TOTAL	112.569.730.026	104.726.058.460	93,03
1	BELANJA OPERASI	19.363.368.461	18.465.878.054	95,37
	BELANJA PEGAWAI	5.914.526.215	5.558.602.304	93,98
	BELANJA BARANG DAN JASA	13.448.842.246	12.907.275.750	95,97
2	BELANJA MODAL	93.206.361.565	86.260.180.406	92,55
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.144.243.799	1.144.240.199	99,9997
	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	92.062.117.766	85.115.940.207	92,45

3.3.2 Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi pemakaian kekayaan daerah bersumber dari retribusi pemakaian . Target pendapatan sumber ini adalah sebesar Rp. 1.100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 257.759.200 atau (23.43%). Realisasi pendapatan secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.
Realisasi Pendapatan 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI 2025 (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.1	Retribusi Pemakaian alat	1.100.000.000	257.759.200	23,43
	Total Pendapatan	1.100.000.000	257.759,200	23,43

3.3.3 Belanja

Jumlah alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : DPPA/A.3/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai



Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.112.569.730.026,- yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 104.726.058.460,- atau terserap 93,03%.

Rincian realisasi anggaran dan capaian belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
Anggaran, realisasi dan capaian belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
	TOTAL	112.569.730.026	104.726.058.460	93,03
1	BELANJA OPERASI	19.363.368.461	18.465.878.054	95,37
	BELANJA PEGAWAI	5.914.526.215	5.558.602.304	93,98
	BELANJA BARANG DAN JASA	13.448.842.246	12.907.275.750	95,97
2	BELANJA MODAL	93.206.361.565	86.260.180.406	92,55
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.144.243.799	1.144.240.199	99,9997
	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	92.062.117.766	85.115.940.207	92,45

3.3.4 Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Rincian realisasi anggaran belanja menurut sasaran program/kegiatan strategis Dinas PUPR Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.15.
Realisasi Penyerapan Anggaran Program Per Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Satuan
	UTAMA						
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEG. : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	477.005.000	475.540.900	99,69	Persen
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	76.046.443.879	69.521.051.060	91,42	Persen



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	Satuan
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.790.633.826	2.766.130.561	99,12	Persen
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEG. : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	3.083.280.000	3.054.323.612	99,06	Persen
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.536.014.000	9.459.275.949	99,20	Persen
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.490.452.000	8.883.691.061	93,61	Persen
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.800.473.060	1.797.531.200	99,84	Persen
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	301.300.000	238.635.167	79,20	Persen
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.218.652.049	1.206.661.799	99,02	Persen
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	259.084.750	187.190.648	72,25	Persen
PENDUKUNG							
8	Program Pendukung	Persentase urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.566.391.462	7.136.026.503	94,31	Persen
		TOTAL		112.569.730.026	104.726.058.460	93,03	Persen

3.3.5 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = (1 - \frac{RA/RK}{TA/TK}) \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi (%)

RA : Realisasi Anggaran (Rp.)

RK : Realisasi Kinerja (%)

TA : Target Anggaran (Rp.)

TK : Target Kinerja (%)

(Sumber rumus : PMK No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)



Penggunaan sumber daya khususnya berkaitan dengan anggaran pada Dinas PUPR di Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,21%. Angka ini naik menuju angka positif dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar -2,169%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penganggaran yang semakin baik dengan memperhitungkan target RPJMD 2021-2026 untuk bisa tercapai. Dinas PUPR tetap berkomitmen untuk menargetkan efektifitas anggaran bergerak pada angka positif (+). Rata-rata hasil pengukuran kinerja Dinas PUPR Tahun 2023 yaitu dari 7 (Tujuh) sasaran strategis, mencapai persentase 98,66% dengan kategori SANGAT BAIK, dan penyerapan program yang mendukung sasaran strategis sebesar 98,82%.

Pada tahun 2024, capaian kinerja menunjukkan **tingkat efisiensi sebesar 0,04%**. Walaupun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, namun tren capaian kinerja tetap dipertahankan di angka positif yang menerangkan adanya efisiensi penganggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik dan tepat sasaran.

Pada tahun 2025 capaian kinerja menunjukkan **tingkat efisiensi sebesar 0,96%**, melampaui efisiensi pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menerangkan bahwa penggunaan belanja semakin disesuaikan dengan prioritas target kinerja dinas, dan tren positif efisiensi anggaran terhadap kinerja akan terus ditingkatkan.

Tabel 3.16.

Tingkat Efisiensi Penganggaran Dinas PUPR Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI IDEAL	GAP	EFISIENSI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) *100	(7)	(8)	(9)	(10) = (8)/(9)*100	(11) = (8)*(4)/(5)	(12) = (9)-(11)	(13) = (12)/(11)	(14)
UTAMA													
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	48,17	33,62	69,79	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEG. : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	477.005.000	475.540.900	99,69	332.923.149	(142.617.751)	-42,84	TIDAK EFISIEN
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	64,95	55,88	86,04	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	76.046.443.879	69.521.051.060	91,42	65.426.871.193	(4.094.179.867)	-6,26	TIDAK EFISIEN
3	Meningkatnya jaringan	Persentase Drainase	84,80	72,92	85,99	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	2.790.633.826	2.766.130.561	99,12	2.399.533.626	(366.596.935)	-15,28	TIDAK EFISIEN



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI IDEAL	GAP	EFISIENSI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) * 100	(7)	(8)	(9)	(10) = (8)/(9) * 100	(11) = (8)*(4)/(5)	(12) = (9)-(11)	(13) = (12)/(11)	(14)
	drainase perkotaan	Perkotaan yang terbangun				PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	95,84	88,97	92,83	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEG. : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	3.083.280.000	3.054.323.612	99,06	2.862.264.416	(192.059.196)	-6,71	TIDAK EFISIEN
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	86,93	86,66	99,69	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.536.014.000	9.459.275.949	99,20	9.506.670.966	47.395.017	0,50	EFISIEN
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	92,00	87,92	95,57	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.490.452.000	8.883.691.061	93,61	9.069.571.085	185.880.024	2,05	EFISIEN
		Persentase jalan lingkungan yang terbangun	38,30	34,31	89,57	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.800.473.060	1.797.531.200	99,84	1.612.731.019	(184.800.181)	-11,46	TIDAK EFISIEN
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	52,00	43,28	83,23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	301.300.000	238.635.167	79,20	250.774.308	12.139.141	4,84	EFISIEN
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,029	0,016	55,52	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.218.652.049	1.206.661.799	99,02	676.536.614	(530.125.185)	-78,36	TIDAK EFISIEN
		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	83,00	100,00	120,48	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	259.084.750	187.190.648	72,25	312.150.301	124.959.653	40,03	EFISIEN
PENUNJANG													
7	Program Pendukung	Persentase urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	99,00	99,00	100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.566.391.462	7.136.026.503	94,31	7.566.391.462	430.364.959	5,69	EFISIEN
		TOTAL	100		97,36		112.569.730.026	104.726.058.460	93,03	105.742.653.966	1.016.595.506	0,96	EFISIEN

3.3.6 Efektifitas Capaian Kinerja

Efektifitas capaian kinerja diukur dari capaian indikator kinerja terhadap target kinerja. Indikator dinyatakan efektif apabila realisasi kinerja melebihi target kinerja tahun berjalan. Sebaliknya, Indikator dinyatakan tidak efektif apabila realisasi kinerja kurang target kinerja tahun berjalan. Efektifitas capaian kinerja dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f)/(e)x100%	
PROGRAM DASAR							
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17	33,62	69,79	Tidak Efektif



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f)/(e)x100%	
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95	55,88	86,04	Tidak Efektif
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen	84,80	72,92	85,99	Tidak Efektif
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84	88,97	92,83	Tidak Efektif
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,93	86,66	99,69	Tidak Efektif
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00	87,92	95,57	Tidak Efektif
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	38,30	34,31	89,57	Tidak Efektif
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00	43,28	83,23	Tidak Efektif
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,029	0,016	55,52	Tidak Efektif
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	83,00	100,00	120,48	Efektif
	PROGRAM PENDUKUNG	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen	99	99	100	Efektif
	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	Persen	100	100	100	Efektif
	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	Persen	100	100	100	Efektif
	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Persentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	Persen	100	100	100	Efektif
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	Efektif

Berdasarkan data efektivitas capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Dasar

- Sebagian besar indikator program dasar dinyatakan tidak efektif dengan capaian kinerja di bawah 100%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program, seperti pada pembangunan bangunan pengendali bencana (69,79%),



jaringan jalan (86,04%), drainase perkotaan (85,99%), dan infrastruktur pengairan lahan (92,83%).

- Meskipun beberapa indikator menunjukkan progres mendekati target, seperti Persentase luas daerah terlayani irigasi primer (88,97%), Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan (87,92%), masih diperlukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas.
- Semua indikator pada program pendukung berhasil mencapai efektivitas 100%, Hal ini menandakan bahwa sistem pendukung administratif berjalan baik.

2. Rekomendasi Umum

- Meningkatkan Perencanaan dan Pengawasan: Mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab ketidakefektifan capaian program dasar, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun teknis pelaksanaan.
- Fokus pada Indikator Prioritas: Menyusun strategi khusus untuk indikator-indikator yang memiliki capaian kinerja rendah, seperti rasio bangunan ber-IMB 55,52%
- Mempertahankan Capaian Program Pendukung: Konsistensi dalam pengelolaan urusan administrasi harus terus dijaga, karena ini menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

Keseluruhan analisis menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara perencanaan strategis dan implementasi teknis guna memastikan target RPJMD 2026 dapat tercapai.

3.4 INOVASI

3.4.1 Pengenalan Inovasi

Pada tahun 2024, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki target inovasi dengan jumlah sebanyak 1 Inovasi yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan lingkup bidang dinas PUPR. Inovasi pada tahun 2024 diimplementasikan dengan nama aplikasi “Metaruang” yang merupakan singkatan dari Media Tata Ruang Manggarai. Aplikasi ini memberikan solusi untuk mendukung perencanaan tata ruang yang efisien, serta menghubungkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten



Manggarai. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman <https://metaruang.glideapp.io>. Salah satu perubahan yang dilakukan melalui aplikasi Metaruang adalah penyediaan informasi yang lengkap dan terkini mengenai tata ruang di Kabupaten Manggarai. Aplikasi ini menyediakan akses ke data dan sumber daya penting, termasuk peraturan, pedoman, dan peta Rencana Tata Ruang online. Pengguna aplikasi dapat dengan mudah menjelajahi informasi ini untuk memahami penggunaan lahan saat ini, daerah perlindungan, dan proyek pembangunan yang diusulkan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi, Metaruang juga mengintegrasikan sistem Online Single Submission. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan perizinan dan pengelolaan berbagai aktivitas tata ruang secara online. Integrasi OSS dalam aplikasi Metaruang mengurangi birokrasi dan menghemat waktu serta sumber daya yang berharga bagi bisnis dan individu di Kabupaten Manggarai.

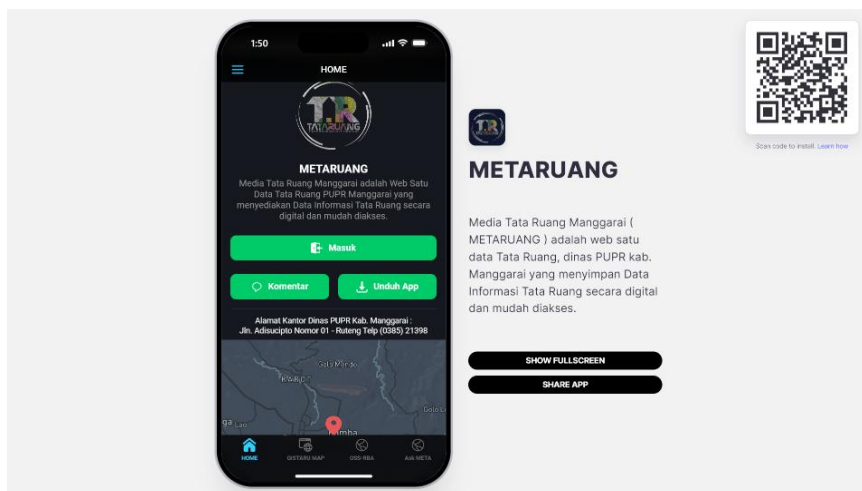
Pada tahun 2022 aplikasi masih berbasis informatif yang menampilkan informasi regulasi dan data tata ruang. Tahun 2023 aplikasi ditingkatkan menjadi berbasis interaktif, dimana pengguna bisa menggunakan fitur lokasi untuk mengakses peta pola ruang kabupaten manggarai secara real time. Tahun 2024 pengembangan aplikasi menambahkan fitur customer service terintegrasi dengan media sosial untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi lebih rinci. Metaruang juga menambahkan fitur absensi untuk kategori tata kelola pemerintahan, yang dikhususkan bagi asn dan non asn PUPR kab. Manggarai.

Dengan Metaruang, Kabupaten Manggarai memiliki alat yang kuat untuk mewujudkan visi pengembangan yang berkelanjutan dan merata. Aplikasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata ruang, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Metaruang adalah langkah maju yang penting dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan tata ruang di Kabupaten Manggarai. Adapun hasil dari inovasi ini berupa :

- Akses Informasi yang Lebih Mudah: Dengan Metaruang, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi terkini tentang tata ruang di Kabupaten Manggarai. Data, peraturan, dan pedoman terkait penggunaan lahan, zonasi, dan proyek pembangunan tersedia dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan efisien.



- Proses Perizinan yang Lebih Efisien: Integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan pengguna untuk mengurus perizinan dan pengurusan aktivitas tata ruang secara online. Hal ini mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi, mempercepat kelancaran perizinan dan memudahkan pengguna dalam menjalankan kegiatan tata ruang.
- Visualisasi Tata Ruang yang Lebih Jelas: Dengan akses ke peta Rencana Tata Ruang (RTR) online oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), pengguna dapat memvisualisasikan penggunaan lahan saat ini, daerah perlindungan, dan proyek pembangunan yang diusulkan di Kabupaten Manggarai. Ini membantu pengguna dalam memahami kondisi tata ruang secara lebih jelas dan membuat keputusan yang terinformasi.
- Bantuan Instan Melalui Chatbot: Fitur chatbot *Meta Intelligence* yang terhubung dengan teknologi GPT memberikan bantuan instan kepada pengguna. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan terkait tata ruang dan menerima respons yang akurat dan real-time. Ini memfasilitasi pertukaran informasi dan membantu pengguna dalam mendapatkan panduan yang dibutuhkan dengan cepat.



Gambar 3.1. Dashboard Aplikasi Metaruang

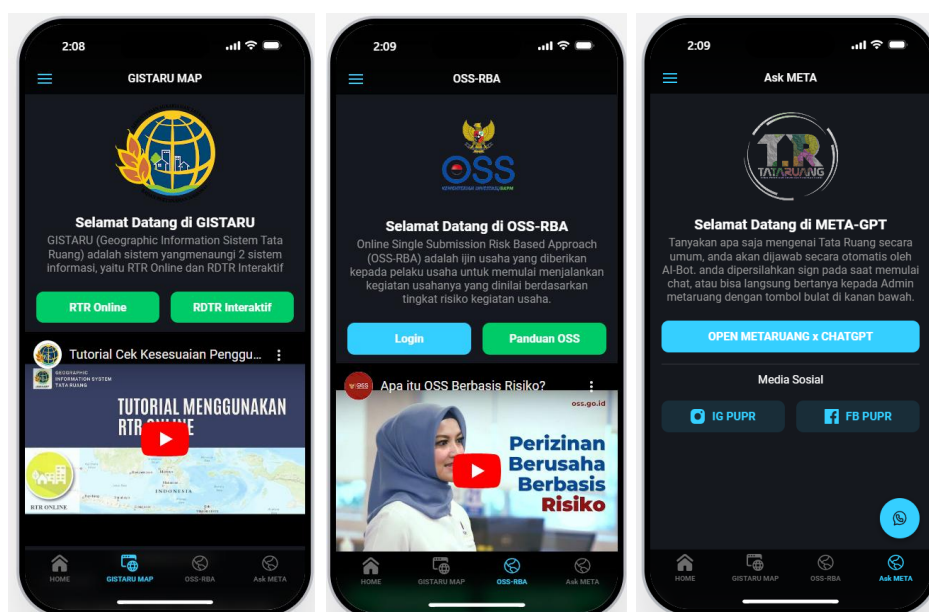
Adapun *Standard Operating Procedure* di jabarkan dalam tabulasi sebagai berikut :

Tabel 3.16
Standard Operating Procedure Penyusunan Inovasi Media Tata Ruang
(METARUANG)



No.	Kegiatan	Tim Inovasi / Penanggungjawab	Kepala Dinas PUPR	Pengguna Aplikasi	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Pembuatan SK				- Draft SK Inovasi - Draft SK Tim Penanggung-jawab	1 hari kerja	- SK Inovasi - SK Tim Penanggung-jawab	
2	Tim Inovasi menyusun KAK, SOP agar rencana inovasi dapat ditindaklanjuti				- Draft KAK - Draft SOP	3 hari kerja	- KAK, - SOP	
3	SOP dan KAK disetujui, inovasi ditindaklanjuti					1 hari kerja	- Penandatanganan KAK dan SOP	
4	Tim inovasi melakukan analisis kebutuhan, perencanaan pengembangan aplikasi, dan pengumpulan database.				- Database Penataan Ruang - Laptop - Jaringan Internet	5 hari kerja	- Data Base App, - Aplikasi Online Metaruang	
5	Aplikasi yang dibuat, disosialisasikan, diimplementasikan dan dilakukan uji coba				- Undangan - Daftar Hadir - Perlengkapan presentasi - Materi Inovasi - Form Masukan (lewat aplikasi)	2 hari kerja	- Undangan Bimtek - Daftar Hadir - Respon Pengguna	
6	Data Respon pengguna dikelola, dilakukan perbaikan dan peningkatan performa aplikasi secara keseluruhan				- Form masukan yang telah diinput	3 hari kerja	- Daftar Masukan Pengguna Aplikasi - Aplikasi yang diperbaiki	
7	Melakukan Evaluasi untuk pembaharuan dan perluasan skala aplikasi				- Hasil perbaikan-perbaikan pada aplikasi	2 hari kerja	- Aplikasi yang dikembangkan berdasarkan masukan	
8	Laporan Pelaksanaan Inovasi				- Laporan	1 hari kerja	- Laporan	

Aplikasi ini memudahkan layanan yang berhubungan dengan persetujuan teknis pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan Geographic Information System Tata Ruang (GISTARU), Online Single Submission (OSS) dan Meta Intelligence.



Gambar 3.2. Fitur Aplikasi Metaruang

Dengan diluncurkannya aplikasi merespon banyaknya feedback positif pengguna aplikasi. Berdasarkan rekapitulasi data, sebanyak 224 feedback yang diberikan sebagai berikut :



Survey Kepuasan Pengguna Aplikasi

1 = Buruk Sekali ; 2 =Buruk ; 3 =Netral ; 4 =Baik ; 5 = Baik Sekali

Gambar 3.3. Survey Kepuasan

3.4.2 Realisasi Pengukuran Target Inovasi

Dengan diluncurkannya aplikasi Metaruang, Dinas PUPR memenuhi target sesuai perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Pengukuran Kinerja Inovasi

No	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	1

Dengan adanya Metaruang, proses pengelolaan tata ruang menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Metaruang memungkinkan akses terbuka dan transparan terhadap informasi tata ruang kepada masyarakat. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang. Masyarakat dapat memahami kebijakan, regulasi, dan proses perizinan yang berlaku, serta memberikan masukan dan pendapat mereka. Hal ini mendorong keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan tata ruang. Metaruang memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga penelitian. Mereka dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengoptimalkan pengelolaan tata ruang. Sinergi ini mendorong inovasi, pertukaran ide, dan solusi yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2025 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja terhadap 6 (Enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun yang akan datang. Dinas PUPR berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 104.726.058.460,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp 112.569.730.026,- atau sebesar 93,03%. Capaian kinerja keseluruhan untuk enam sasaran strategis mencapai 87,87% dengan kategori **Baik**.

Meskipun terdapat pencapaian positif dalam pengelolaan anggaran dan sebagian besar indikator program pendukung, beberapa tantangan masih terlihat dalam pelaksanaan program dasar. Sebagian besar indikator program dasar dinyatakan tidak efektif karena realisasi kinerja berada di bawah target tahunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan implementasi teknis yang perlu segera diatasi untuk memastikan hasil yang lebih optimal di tahun mendatang. Namun dari segi pengelolaan keuangan, masih terbilang efisien karena berada pada angka positif. Efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,96%. Tren positif ini telah menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah mampu mengelola anggaran dengan baik, memastikan setiap program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Faktor yang berkontribusi pada capaian ini meliputi pengelolaan belanja operasi yang mencapai realisasi 95,37% dan belanja modal sebesar



97,43%. Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi mencatat kinerja yang baik dengan realisasi 92,55%, mendukung prioritas pembangunan infrastruktur dasar.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada penyedia jasa untuk mendapatkan hasil kerja konstruksi yang bermutu dan tepat waktu;
2. Melaksanakan proses lelang lebih awal dan tepat waktu dengan melakukan koordinasi intens dengan pihak-pihak terkait;
3. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi,
4. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas,
5. Mengalokasikan anggaran yang cukup dengan tetap memperhatikan skala prioritas;
6. Validitas data baik data perencanaan maupun data akhir sebagai bahan laporan dan evaluasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya.

Ruteng, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

Wilfridus E. Elfrid Turuk, ST

Pembina

33NIP. 19751014 200604 1 012



LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



RENCANA KINERJA PERUBAHAN



MONEV RENAksi TRIW 1-4 TAHUN 2025



MATRIX RENSTRA 2021-2026